


MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Penyelenggaraan Pegawai</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.</p> <p>Sub Kegiatan : Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Tujuan : Tercapainya target pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko.</p>	<p>- Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.</p> <p>- Data fungsional APIP yang melakukan pembinaan terdiri dari 20 Oarang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan.</p> <p>- Jumlah cakupan pengawasan terhadap Lembaga Pemerintah Daerah sebanyak 182 Nagari, 41 Perangkat Daerah, 385 UPT SD, 78 UPT SMP dan 21 Puskesmas.</p> <p>- Temuan Pengawasan 2 (Dua) tahun terakhir: a. Tahun 2021 : 602 b. Tahun 2022 : 426</p>	<p>Akses : Keterbatasan waktu Tim pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan dan evaluasi.</p> <p>Partisipasi : - Belum adanya pelatihan bagi APIP untuk pendampingan penyusunan PPPRG secara intensif dan optimal - Perhatian terhadap masalah ASN perempuan belum menjadi perhatian.</p> <p>Kontrol : Dalam hal pengambilan keputusan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan.</p> <p>Manfaat : - Akuratnya data dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. - Terstrukturnya</p>	<p>- Pejabat terkait masih netral gender</p> <p>- Perencanaan kegiatan dan pengalokasian anggaran belum semua berdasarkan permasalahan yang ada (basic data) masih meneruskan kegiatan tahun sebelumnya.</p> <p>- Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa untuk memfasilitasi pelaksanaan pengawasan.</p> <p>- Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya</p> <p>- Belum proporsional tingkatan jabatan fungsional yang tersedia dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan</p> <p>- Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya</p>	<p>-Belum optimalnya Tenaga Fungsional pengawas (Auditor dan PPUPD) yang dibutuhkan berdasarkan Obrik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan.</p> <p>-Kebutuhan Auditor seharusnya 67 orang, yang tersedia saat ini 23 orang masih ada kekurangan 44 orang.</p> <p>-Kebutuhan PPUPD seharusnya 48 Orang, yang tersedia saat ini 4 Orang masih ada kekurangan 44 Orang.</p> <p>-Kurangnya komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk menindaklanjuti hasil pengawasan.</p>	<p>- Menurunnya jumlah temuan SKPD yang tidak mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan.</p> <p>- Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.</p>	<p>- Rapat internal Inspektorat Daerah untuk persiapan pelaksanaan Audit Ketaatan pada obyek pemeriksaan (Perangkat Daerah, Nagari, Sekolah dan Puskesmas).</p> <p>- Melakukan pemeriksaan / Audit Ketaatan sekaligus audit ada tidaknya penerapan PPRG pada obrik tersebut.</p> <p>- Memberikan rekomendasi untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) pada obrik yang bersangkutan.</p>	<p>- Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan.</p> <p>- Data fungsional APIP yang melakukan pembinaan terdiri dari 20 Oarang Laki-laki dan 16 Orang Perempuan.</p> <p>- Jumlah cakupan pengawasan terhadap Lembaga Pemerintah Daerah sebanyak 182 Nagari, 41 Perangkat Daerah, 385 UPT SD, 78 UPT SMP dan 21 Puskesmas.</p> <p>- Temuan Pengawasan 2 (Dua) tahun terakhir: a. Tahun 2021 : 602 b. Tahun 2022 : 426</p>	<p>Sub Kegiatan: Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Input : Rp.700.000.000,-</p> <p>Output: Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</p> <p>Outcome: Laporan keuangan SKPD yang baik dan sesuai aturan.</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
		<p>perencanaan kegiatan sesuai dengan aturan, standar atau norma yang berlaku.</p> <p>- Selarasnya dokumen Renstra, IKU PD, Laporan AKIP PD, Perjanjian Kinerja dan lainnya yang disajikan dalam dokumen yang direviu.</p> <p>- Pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah dan terukurnya tingkat keberhasilan/tidaknya melalui inventarisasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.</p>	<p>sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini</p> <p>- Belum pemahannya konsep gender oleh pengelola kegiatan</p>					

Painan, 17 Mei 2023
 Inspektur,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641112 1992 1 008

**GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

NO	ASPEK	URAIAN
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
2	Output kegiatan	Rp700.000.000,-
3	Analisa situasi	Berdasarkan hasil survey kepuasan mitra kerja tingkat resiko terhadap pengawasan yang mengintegrasikan gender dalam perencanaan pembangunan.
4	Rencana Aksi	Penyelenggaraan Pengawasan <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 2. Rapat internal Inspektorat Daerah untuk persiapan pelaksanaan Audit Ketaatan pada obyek pemeriksaan (Perangkat Daerah, Nagari, Sekolah dan Puskesmas). 3. Melakukan pemeriksaan / Audit Ketaatan sekaligus audit ada tidaknya penerapan PPRG pada obrik tersebut. 4. Memberikan rekomendasi untuk melakukan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) pada obrik yang bersangkutan.
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Jumlah Anggaran sebesar Rp700.000.000,-
6	Dampak/hasil Output Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah adalah 175 Laporan
Program		Penyelenggaraan Pengawasan
Sasaran Program		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah
Sub. Kegiatan		Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
Latar Belakang	Dasar Hukum	APBD
	Gambaran Umum	-
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Melaksanakan audit ketaatan (ketaatan terhadap aturan yang berlaku) pada Perangkat Daerah, Nagari, Sekolah dan Puskesmas.
	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah

	Batasan Kegiatan	175 objek pemeriksaan
Maksud dan Tujuan		<p>Maksud : Pengawasan keuangan dimaksudkan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan dalam hal keuangan tidak menyimpang dari tujuan dan rencana yang telah ditetapkan.</p> <p>Tujuan : Pengawasan keuangan bagi Pemerintahan Daerah bertujuan untuk menjamin dan menjaga agar anggaran yang disusun benar – benar dapat dijalankan, menjaga kegiatan pengumpulan penerimaan dan pembelanjaan pengeluaran daerah sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan menjaga pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku.</p>
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Memberikan pembinaan, solusi dan penegasan aturan penyelenggaraan keuangan pemerintah daerah kepada masing-masing PD dan Pejabat Pengelola keuangan langsung.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Kabupaten Pesisir Selatan.
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Inspektur
Jadwal		Januari s.d. Desember
Biaya		Rp700.000.000,-

Painan, 17 Mei 2023
 Inspektur,

RUSDIYANTO S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641112 199203 1 008


MATRIK GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program : Penyelenggaraan Pegawai</p> <p>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan Internal.</p> <p>Sub Kegiatan : Reviu Laporan Kinerja</p> <p>Tujuan : Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. - Jumlah Perangkat Daerah sebanyak 41 - Evaluasi Laporan AKIP, Reviu LPPD, PBJ, Manajemen ASN, Tata Kelola Perizinan, Tata Kelola Pajak, Reviu Tata Kelola Aset, PPRG. - Data kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 - Jumlah PNS Inspektorat sebanyak 58 orang terdiri dari Pejabat Struktural 8 orang, Pejabat Fungsional 34 orang dan 16 orang - Jumlah Tim Pemeriksa sebanyak 36 orang yang terdiri 	<p>Akses : Keterbatasan waktu pemeriksa dalam pemeriksaan evaluasi.</p> <p>Partisipasi : Keterbatasan Ruang Gerak bagi perempuan dalam melaksanakan tugas pemeriksaan.</p> <p>Kontrol : Dalam hal pengambilan keputusan lebih didominasi oleh keputusan pimpinan.</p> <p>Manfaat : - Akuratnya data dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. - Terstrukturnya perencanaan kegiatan sesuai dengan aturan, standar atau norma yang berlaku. - Selarasnya dokumen</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan jumlah SDM pemeriksa untuk memfasilitasi pelaksanaan reviu. - Profesionalisme tenaga pemeriksa masih belum merata baik dari segi kapasitas dan kompetensinya - Belum proporsional tingkatan jabatan fungsional yang tersedia dikaitkan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan pemeriksaan - Sistem Pengendalian Intern belum berjalan sebagaimana mestinya sehingga kelemahan, hambatan serta penyimpangan dan pelanggaran belum dapat dicegah secara dini - Belum pahamnya konsep gender oleh pengelola kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya Tenaga Fungsional Pengawas (Auditor dan PPUPD) yang dibutuhkan berdasarkan Obrik yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan. - Kebutuhan Auditor seharusnya 67 orang, yang tersedia saat ini 23 orang masih ada kekurangan 44 orang. - Kebutuhan PPUPD seharusnya 48 Orang, yang tersedia saat ini 4 Orang masih ada kekurangan 44 Orang. 	<ul style="list-style-type: none"> - Untuk menjamin agar penyelenggaraan Pemerintahan daerah berjalan sesuai dengan rencana dan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reviu laporan Kinerja atas Dokumen Perencanaan dan Laporan (41 Perangkat Daerah). - Mengajukan usulan formasi PNS tenaga Fungsional ke BKPSDM - Mengajukan usulan Uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional PPUPD ke Kemendagri - Melakukan evaluasi dan Reviu PPRG di Perangkat Daerah yang menjadi Obyek Pemeriksaan (Obrik) pada triwulan III dan Truwulan IV. 	<ul style="list-style-type: none"> - Inspektorat Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan. - Jumlah Perangkat Daerah sebanyak 41 - Evaluasi Laporan AKIP, Reviu LPPD, PBJ, Manajemen ASN, Tata Kelola Perizinan, Tata Kelola Pajak, Reviu Tata Kelola Aset, PPRG. - Data kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2023 - Jumlah PNS Inspektorat sebanyak 58 orang terdiri dari Pejabat Struktural 8 orang, Pejabat Fungsional 34 orang dan 16 orang 	<p>Sub Kegiatan: Reviu Laporan Kinerja</p> <p>Input : Rp.100.000.000,-</p> <p>Output: Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja</p> <p>Outcome: Laporan hasil Reviu yang baik dan sesuai aturan.</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	dari: 20 orang laki-laki dan 16 orang perempuan.	Renstra, IKU PD, Laporan AKIP PD, Perjanjian Kinerja dan lainnya yang disajikan dalam dokumen yang direviu. - Pengendalian terhadap pelaksanaan kebijakan pengawasan Inspektorat Daerah dan terukurnya tingkat keberhasilan/tidaknya melalui inventarisasi berbagai permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.					Jumlah Tim Pemeriksa sebanyak 36 orang yang terdiri dari: 20 orang laki-laki dan 16 orang perempuan.	

Painan, 17 Mei 2023
Inspektur,



RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 1964111219921008

**GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Penyelenggaraan Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Internal Reviu Laporan Kinerja	
2	Output kegiatan	Rp100.000.000,-	
3	Analisa situasi		
4	Rencana Aksi	Reviu Laporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Reviu laporan Kinerja atas Dokumen Perencanaan dan Laporan (41 Perangkat Daerah). 2. Mengajukan usulan formasi PNS tenaga Fungsional Pemeriksa ke BKPSDM. 3. Mengajukan usulan Uji kompetensi perpindahan jabatan fungsional PPUPD ke Kemendagri 4. Melakukan evaluasi dan Reviu PPRG di Perangkat Daerah yang menjadi Obyek Pemeriksaan (Obrik) pada triwulan III dan Truwulan IV.
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Jumlah Anggaran sebesar Rp100.000.000,-	
6	Dampak/hasil Output Kegiatan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja adalah 8 Jenis Laporan Hasil Reviu	
Program		Penyelenggaraan Pengawasan	
Sasaran Program		Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Perangkat Daerah	
Sub. Kegiatan		Reviu Laporan Kinerja	

Latar Belakang	Dasar Hukum	APBD
	Gambaran Umum	-
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Evaluasi Laporan AKIP, Reviu LPPD, PBJ, Manajemen ASN, Tata Kelola Perizinan, Tata Kelola Pajak, Reviu Tata Kelola Aset, Reviun PPRG.
	Indikator Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja
	Batasan Kegiatan	12 Bulan
Maksud dan Tujuan	Terlaksananya Evaluasi Laporan AKIP seluruh Perangkat Daerah, Reviu Pemerintah daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Reviu PBJ, Reviu Tata Kelola Perizinan, Reviu Manajemen ASN, Reviu Tata Kelola Aset, Reviu PPRG dan Reviu tata Kelola Pajak Daerah.	
Cara Pelaksanaan Kegiatan	Memberikan Solusi dan menegaskan kepada PD dan Pejabat Pengelola keuangan langsung ke PD masing-masing.	
Tempat Pelaksanaan Kegiatan	Kabupaten Pesisir Selatan.	
Pelaksana& Penanggungjawab Kegiatan	Inspektur	
Jadwal	Januari s.d. Desember	
Biaya	Rp100.000.000,-	

Painan, 17 Mei 2023
 Inspektur,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196411121992031008



Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

PD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
<p>Program: Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Tujuan : Terlaksananya 100% Rehabilitasi Gedung Kantor untuk Penambahan ruang Laktasi, Ruang musholah dan Ruang Pelayanan yang menyediakan fasilitas untuk ruang bermain anak yang memadai dan representatif.</p>	<p>Gedung Kantor Inspektorat Daerah belum mencerminkan Gedung kantor yang representatif sebagai tempat kerja yang nyaman dan modern.</p> <p>Belum semua ruangan pada Inspektorat Daerah tersedia dan dapat memenuhi hak seluruh pegawai sebagai Aparatur Negeri Sipil, khususnya Ruang Laktasi, Ruang Bermain Anak dan Musholah</p> <p>Jumlah Pegawai Perempuan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai 43,10% mengharuskan tersedianya Ruang Laktasi, musholah dan Ruang bermain anak yang representatif dan responsif gender.</p> <p>Dengan terciptanya ruangan gedung kantor yang representatif dan</p>	<p>Akses :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarana dan prasarana di Inspektorat Daerah masih minim. - Belum tersedianya ruangan gedung kantor yang memadai, khususnya ruang laktasi, musholah yang representatif dan responsif gender serta ruang bermain anak - Rehabilitasi Gedung kantor diharapkan akan mengakomodir kebutuhan untuk penambahan ruang laktasi musholah dan ruang bermain anak. <p>Partisipasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh pegawai yang ada di Inspektorat Daerah paham akan pentingnya pengarusutamaan gender. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelola kegiatan belum responsive gender. - Pandangan yang salah dari sebagian pegawai Inspektorat Daerah dalam memahami isu gender. - Karena keterbatasan anggaran yang diberikan oleh TAPD pada Inspektorat Daerah yang mengakibatkan sarana dan prasarana masih minim. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruh stakeholder dan masyarakat yang ada memahami tentang pentingnya fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah dalam membangun tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>) dan bebas KKN. 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya Gedung kantor yang nyaman representatif, khususnya ruang laktasi dan musholah Inspektorat Daerah yang responsive gender. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi kepada pegawai Inspektorat Daerah tentang pentingnya pengarusutamaan gender. - Menyiapkan seluruh dokumen perencanaan dan personil terkait dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya - Implementasi rehab gedung kantor, yaitu penambahan ruangan untuk Ruang Laktasi, Musholah dan Ruang bermain anak. - Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/di 	<ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas umum yang ada pada gedung kantor Inspektorat Daerah adalah tempat parkir dan musholah namun belum responsif gender serta belum tersedia ruang laktasi dan ruang bermain anak. - Ruang kerja yang ada masih terbatas belum mengakomodasi kebutuhan pegawai. - Komposisi jenis kelamin pada Inspektorat Daerah adalah 56,90% laki-laki dan 43,10% perempuan. 	<p>Sub Kegiatan: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</p> <p>Input : Rp200.000.000,-</p> <p>Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/di rehabilitasi adalah 1 Unit.</p> <p>Outcome: Ruang laktasi representatif, ruang bermain anak dan musholah yang responsive gender.</p>

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Basis Data (Base-Line)	Indikator Kinerja
	responsif gender tentu juga akan parallel dengan meningkatnya kinerja seluruh pegawai yang nantinya akan berdampak pada peningkatan tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Government).	Kontrol : - Ruang kantor yang ada hanya sekedar memenuhi tempat bekerja saja, belum memenuhi hak pegawai. Manfaat : - Gedung Kantor Inspektorat Daerah belum mencerminkan, ruangan yang nyaman bagi seluruh pegawai. khususnya ruang laktasi musholah dan ruang bermain anak.				rehabilitasi adalah 1 Unit.		

Painan, 17 Mei 2023
 Inspektur,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641112 199203 1 008

**GENDER BUDGET STATEMEN (GBS)
INSPEKTORAT KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2024**

NO	ASPEK	URAIAN	
1	Program : Kegiatan : Sub Kegiatan :	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
2	Output kegiatan	Rp200.000.000,-	
3	Analisa situasi		
4	Rencana Aksi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi kepada pegawai Inspektorat Daerah tentang pentingnya pengarusutamaan gender. 2. Menyiapkan seluruh dokumen perencanaan dan personil terkait dengan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3. Implementasi rehab gedung kantor, yaitu penambahan ruangan untuk Ruang Laktasi, Musholah dan Ruang bermain anak. 4. Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/di rehabilitasi adalah 1 Unit.
5	Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Jumlah Anggaran sebesar Rp200.000.000,-	
6	Dampak/hasil Output Kegiatan	Ruangan laktasi yang representative, Ruang bermain anak dan musholah dan responsive gender 1 Unit.	
Program		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	
Sasaran Program		Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Inspektorat Daerah	
Kegiatan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Sub Kegiatan		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Latar Belakang	Dasar Hukum	APBD
	Gambaran Umum	-
Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pemeliharaan/ Rehabilitasi gedung kantor Inspektorat Daerah yang akan dilaksanakan : Penyediaan Ruang Laktasi, Ruang bermain Anak dan Ruang Musholah yang responsive gender.
	Indikator Kinerja	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/di rehabilitasi
	Batasan Kegiatan	12 Bulan
Maksud dan Tujuan		Sebagai instansi pengawasan yang mengutamakan pelayanan kepada perangkat daerah serta masyarakat, Inspektorat Daerah perlu menyediakan ruangan kantor yang nyaman, representative dan responsive gender.
Cara Pelaksanaan Kegiatan		Menyiapkan dokumen perencanaan, personil dan mengajukan anggaran terkait dengan kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.
Tempat Pelaksanaan Kegiatan		Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
Pelaksana & Penanggungjawab Kegiatan		Inspektur
Jadwal		Januari s.d. Desember
Biaya		Rp200.000.000,-

Paiman, 17 Mei 2023
 Inspektur,

RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19641112 199203 1 008